

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015**

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Pernyataan Telah Direviu | 3 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 4 |
| Ringkasan | 6 |
| I Laporan Realisasi Anggaran | 8 |
| II Neraca | 9 |
| III Laporan Operasional | 10 |
| IV Laporan Perubahan Ekuitas | 11 |
| V Catatan atas Laporan Keuangan | 12 |
| A Penjelasan Umum | 12 |
| B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | |
| B.1 Pendapatan | 20 |
| B.2 Belanja | 21 |
| B.2.1 Belanja Barang | 21 |
| B.2.2 Belanja Sosial | 22 |
| C Penjelasan atas Pos-pos Neraca | |
| C.1 Aset Lancar | 24 |
| C.1.1 Persediaan | 24 |
| C.2 Aset Tetap | 24 |
| C.2.1 Peralatan dan Mesin | 24 |
| C.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 24 |
| C.3 Ekuitas | 25 |
| C.3.1 Ekuitas | 25 |
| D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | |
| D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 26 |
| D.2 Beban Persediaan | 26 |
| D.3 Beban Barang dan Jasa | 26 |
| D.4 Beban Pemeliharaan | 27 |
| D.5 Beban Perjalanan Dinas | 27 |
| D.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 28 |
| D.7 Beban Bantuan Sosial | 28 |
| D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi | 29 |

| | | |
|-----|---|----|
| D.9 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 29 |
| E | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | |
| E.1 | Ekuitas Awal | 31 |
| E.2 | Surplus/Defisit-LO | 31 |
| E.3 | Penyesuaian Nilai Aset | 31 |
| E.4 | Transaksi Antar Entitas | 31 |
| E.5 | Ekuitas Akhir | 31 |
| F | Pengungkapan-pengungkapan Lainnya | |
| F.1 | Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca | 32 |
| F.2 | Pengungkapan Lain-lain | 32 |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp76.142.959,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp23.040.444.499,00 atau mencapai 96,65% dari alokasi anggaran sebesar Rp23.838.283.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp162.914.670,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp162.914.670,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp162.914.670,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.838.803,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.278.081.843,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23.270.243.040,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp68.304.156,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23.201.938.884,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp351.850.014,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23.201.938.884,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp48.702.000,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.964.301.540,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp162.914.670,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 dan 31 DESEMBER 2014**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2015 | | | 31 Desember 2014 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | %. | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 0,00 | 76.142.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 0,00 | 76.142.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | B.2 | | | | |
| Belanja Operasi | | | | | |
| Belanja Barang | B.2.1 | 11.886.283.000,00 | 11.088.444.499,00 | 93,29 | 8.888.990.940,00 |
| Belanja Sosial | B.2.2 | 11.952.000.000,00 | 11.952.000.000,00 | 100,00 | 6.482.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 23.838.283.000,00 | 23.040.444.499,00 | 96,65 | 15.370.990.940,00 |
| Belanja Modal | | | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | | 23.838.283.000,00 | 23.040.444.499,00 | 96,65 | 15.370.990.940,00 |

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

II. NERACA

**BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 dan 31 DESEMBER 2014**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Persediaan | C.1.1 | 0,00 | 129.500.000,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 0,00 | 129.500.000,00 |
| Aset Tetap | | | |
| Peralatan dan Mesin | C.2.1 | 797.835.000,00 | 797.835.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | C.2.2 | -634.920.330,00 | -575.484.986,00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 162.914.670,00 | 222.350.014,00 |
| Jumlah Aset | | 162.914.670,00 | 351.850.014,00 |
| Ekuitas | | | |
| Ekuitas | C.3.1 | 162.914.670,00 | 351.850.014,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 162.914.670,00 | 351.850.014,00 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 162.914.670,00 | 351.850.014,00 |

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 dan 31 DESEMBER 2014**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|---------|---------------------------|------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 7.838.803,00 | 0.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 7.838.803,00 | 0.00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Persediaan | D.2 | 135.893.500,00 | 0.00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.3 | 7.370.825.000,00 | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan | D.4 | 17.500.000,00 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.5 | 2.860.559.899,00 | 0.00 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D.6 | 881.868.100,00 | 0.00 |
| Beban Bantuan Sosial | D.7 | 11.952.000.000,00 | 0.00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.8 | 59.435.344,00 | 0.00 |
| JUMLAH BEBAN | | 23.278.081.843,00 | 0.00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | -23.270.243.040,00 | 0.00 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.9 | 68.304.156,00 | 0.00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 68.304.156,00 | 0.00 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | -23.201.938.884,00 | 0.00 |

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 dan 31 DESEMBER 2014**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|---------|------------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 351.850.014,00 | 0.00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2 | -23.201.938.884,00 | 0.00 |
| PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN | | | |
| Penyesuaian Nilai Aset | E.3 | 48.702.000,00 | 0.00 |
| Transaksi Antar Entitas | E.4 | 22.964.301.540,00 | 0.00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | | -188.935.344,00 | 0.00 |
| EKUITAS AKHIR | | 162.914.670,00 | 0.00 |

Semarang, 31-12-2015
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Whitono, MSi
NIP. 19580531 198503 1 007

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.**

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didirikan sebagai salah satu upaya **Kementerian Pertanian** untuk meningkatkan dan memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan. Berkedudukan di Jalan Jalan Gatot Subroto KomplekPertanian Tarubudaya yang menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi dalam ketersediaan dan cadangan pangan, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasidistribusi dan harga pangan, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan keamanan pangan, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.

Melalui peranan **Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah** diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam Ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas **Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah** berkomitmen dengan visi “Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah”.

Untuk mewujudkan visi tersebut **Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah** melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Dalam tataran praktisnya, **Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah** membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 Tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 Tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 Tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 Tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Revisi |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja | | |
| Belanja Barang | 11.122.500.000,00 | 11.886.283.000,00 |
| Belanja Sosial | 9.642.000.000,00 | 11.952.000.000,00 |
| Jumlah Belanja | 20.764.500.000,00 | 23.838.283.000,00 |

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp76.142.959,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2015 | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Pendapatan | | | |
| Pendapatan Jasa | 0,00 | 893.368,00 | 0,00 |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 0,00 | 6.945.435,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 68.304.156,00 | 0,00 |
| Jumlah | 0,00 | 76.142.959,00 | 0,00 |

Realisasi Pendapatan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2014. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2015 | Realisasi 31 Desember 2014 | .% |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Pendapatan Jasa | 893.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Iuran dan Denda | 6.945.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 68.304.156,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|
| Jumlah | 76.142.959,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp23.040.444.499,00 atau 96,65% dari anggaran belanja sebesar Rp23.838.283.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2015

| Uraian | 2015 | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Belanja | | | |
| Belanja Barang | 11.886.283.000,00 | 11.129.994.799,00 | 93,64 |
| Belanja Sosial | 11.952.000.000,00 | 12.027.000.000,00 | 100,63 |
| Total Belanja Kotor | 23.838.283.000,00 | 23.156.994.799,00 | 97,14 |
| Pengembalian Belanja | | 116.550.300,00 | 0.00 |
| Total Belanja | 23.838.283.000,00 | 23.040.444.499,00 | 96,65 |

Dibandingkan dengan Tahun 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 49,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Karena pagu yang meningkat dibanding tahun lalu sehingga menyebabkan penyerapan anggaran untuk belanja barang menjadi lebih besar.
2. Kenaikan belanja sosial atau bansos karena nilai bansos lebih besar daripada tahun lalu.
3. Pengembalian belanja karena kekeliruan rekening sebesar Rp 75.000.000,- yang kemudian diserahkan kembali setelah ralat rekening, menyebabkan terjadinya double pencatatan didalam aplikasi pengeluaran.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2015 | Realisasi 31 Desember 2014 | .% |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Belanja Barang | 11.088.444.499,00 | 8.888.990.940,00 | 24,74 |
| Belanja Sosial | 11.952.000.000,00 | 6.482.000.000,00 | 84,39 |
| Total Belanja | 23.040.444.499,00 | 15.370.990.940,00 | 49,90 |

B.2.1 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.088.444.499,00 dan Rp8.888.990.940,00. Realisasi belanja barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 24,74% dari TA 2014. Hal

ini disebabkan antara lain oleh, karena peningkatan harga satuan barang, biaya operasional dan kebutuhan satker yang bertambah.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2015 | Realisasi 31 Desember 2014 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 521.250.000,00 | 431.600.000,00 | 20,77 |
| Belanja Barang Non Operasional | 6.376.028.000,00 | 5.087.442.470,00 | 25,33 |
| Belanja Barang Persediaan | 87.191.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Jasa | 502.100.000,00 | 193.650.000,00 | 159,28 |
| Belanja Pemeliharaan | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2.873.557.199,00 | 3.038.798.470,00 | -5,44 |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda | 579.895.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah | 0,00 | 8.000.000,00 | -100,00 |
| Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 172.473.000,00 | 129.500.000,00 | 33,18 |
| Jumlah Belanja Kotor | 11.129.994.799,00 | 8.888.990.940,00 | 25,21 |
| Pengembalian Belanja Barang | -41.550.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 11.088.444.499,00 | 8.888.990.940,00 | 24,74 |

B.2.2 BELANJA SOSIAL

Realisasi Belanja Sosial per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.952.000.000,00 dan Rp6.482.000.000,00. Realisasi Belanja Sosial TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 84,39% dari TA 2014. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang dengan rincian terlampir.

Perbandingan Belanja Sosial
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian Jenis Bansos | Realisasi 31 Desember 2015 | Realisasi 31 Desember 2014 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | 12.027.000.000,00 | 4.932.000.000,00 | 143,86 |

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2015

| Uraian Jenis Bansos | Realisasi 31 Desember 2015 | Realisasi 31 Desember 2014 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial | 0,00 | 1.550.000.000,00 | -100,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 12.027.000.000,00 | 6.482.000.000,00 | 85,55 |
| Pengembalian Belanja Sosial | -75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 11.952.000.000,00 | 6.482.000.000,00 | 84,39 |

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp129.500.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian Persediaan | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------|-----------------------|
| Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat | 0,00 | 129.500.000,00 |
| Jumlah | 0,00 | 129.500.000,00 |

C.2 ASET TETAP

C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp797.835.000,00 dan Rp797.835.000,00.

C.2.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp-634.920.330,00 dan Rp-575.484.986,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 797.835.000,00 | -634.920.330,00 | 162.914.670,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Akumulasi Penyusutan | 797.835.000,00 | -634.920.330,00 | 162.914.670,00 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|

C.3 EKUITAS

C.3.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp162.914.670,00 dan Rp351.850.014,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.838.803,00 dan Rp0.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|---------------------|------------------|----------------|
| Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 6.945.435,00 | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 893.368,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 7.838.803,00 | 0.00 | 0.00 |

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan Lain-Lain LO yang diperoleh dari Jasa Giro DPM LUEP sebesar Rp 893.368,- dan Pendapatan Denda diperoleh denda DPM LUEP tahun 2007 untuk semester I sebesar Rp 6.849.983, - dan dari denda keterlambatan pekerjaan semester II sebesar Rp 95.452,-

D.2 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp135.893.500,00 dan Rp0.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 135.893.500,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 135.893.500,00 | 0.00 | 0.00 |

D.3 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.370.825.000,00 dan Rp0.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|-------------------------|------------------|----------------|
| Beban Bahan | 2.995.643.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 506.202.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 510.600.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 2.853.080.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Jasa Lainnya | 30.000.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Jasa Profesi | 418.900.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 7.500.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Sewa | 48.900.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 7.370.825.000,00 | 0.00 | 0.00 |

D.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp0.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.500.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 17.500.000,00 | 0.00 | 0.00 |

D.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.860.559.899,00 dan Rp0.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|---|-------------------------|------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 1.403.969.467,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 662.128.400,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 334.581.450,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 461.090.582,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Tetap | -1.210.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 2.860.559.899,00 | 0.00 | 0.00 |

D.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp881.868.100,00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda | 301.973.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 579.895.100,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 881.868.100,00 | 0.00 | 0.00 |

D.7 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.952.000.000,00 dan Rp0.00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|--------------------------|------------------|----------------|
| Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang | 11.952.000.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 11.952.000.000,00 | 0.00 | 0.00 |

Perincian terlampir.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp59.435.344,00 dan Rp0.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 59.435.344,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 59.435.344,00 | 0.00 | 0.00 |

Karena penurunan nilai ekonomis barang.

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--------|------------------|------------------|----------------|
|--------|------------------|------------------|----------------|

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2015

| Uraian | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 | % Naik / Turun |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 68.304.156,00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 68.304.156,00 | 0.00 | 0.00 |

Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 68.304.156,- berasal dari angsuran pokok DPM LUPEP dari tahun 2004 dan 2007 dengan perincian terlampir.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp351.850.014,00 dan Rp0.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp-23.201.938.884,00 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset yang terjadi pada periode tahun berjalan. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp48.702.000,00 dan Rp0.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp162.914.670,00 dan Rp351.850.014,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN karena ada revisi akun yang disebabkan kesalahan akun penutupan TUP yang seharusnya akun 815511 keliru ditulis dengan akun 815111 sebesar Rp 776.347.851,-
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp 348.141.000,- sedang menunggu penerbitan BAST dari Eselon I.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah :

| No. | Nomor Rekening | Atas Nama Rekening | Bank | Saldo Rekening |
|-----|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 1.022.00171-6 | BPG 134 BKP PROV JATENG | BANK JATENG | 0 |